

TAJUK RENCANA

Longgarkan PPKM, Perketat Prokes

MESKIPUN status pemberlakuan (PPKM) wilayah DIY belum turun, masih level 3, namun mobilitas masyarakat nampaknya sudah normal. Jalan-jalan protokol mulai dipadati pengunjung dan sentra kuliner pun diserbu konsumen. Ada semacam 'revenge tourism' atau aksi balas dendam turis setelah sekian lama hanya berdiam diri di rumah tak bisa mengunjungi destinasi wisata.

Agaknya hal ini sudah diperkirakan sejumlah pemerintah daerah, termasuk DIY, guna mengantisipasi banjirnya wisatawan. Karena itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa waktu lalu meminta agar lebih banyak tempat wisata yang dibuka, dengan harapan agar pengunjung tidak menumpuk. Tentu ini dengan persyaratan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Tak cukup hanya itu, secara bertahap DIY juga memberlakukan QR Code untuk seluruh tempat keramaian umum yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. Saat ini aplikasi tersebut sudah gencar dilakukan di destinasi wisata, pusat perbelanjaan serta tempat hiburan dan restoran (KR 11/10). Sedang salah satu syarat mengakses QR Code adalah sertifikat CHSE yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kenyataannya, belum semua tempat keramaian punya fasilitas QR Code. Inilah yang harus terus didorong pemerintah daerah agar tak ada lagi tempat keramaian tanpa dilengkapi QR Code. Hemat kita, QR Code adalah syarat mutlak, karena aplikasi ini bisa menjadi skrening pengunjung apakah yang bersangkutan

sudah divaksin atau belum, dosis ke berapa dan sebagainya. Aplikasi ini juga akan memudahkan tracing ketika yang bersangkutan terpapar Covid-19, telah berkunjung ke mana saja, sehingga mempermudah melacak.

Di samping upaya tersebut, kita tetap mendorong penerapan prokes yang lebih ketat di semua tempat keramaian publik, apalagi PPKM meula dilonggarkan. Sebab, pandemi Covid-19 belum benar-benar berakhir, sehingga potensi penyebaran virus Corona ini masih tetap ada. Bahkan, kekhawatiran munculnya gelombang ketiga Covid-19 juga yang masih ada, meski ini sangat tidak kita harapkan.

Mumpung kondisi kondisi Covid-19 melandai, ditandai dengan turunnya jumlah kasus positif dan turunnya angka kematian serta meningkatnya angka kesembuhan, momentum ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat diri jangan sampai terjadi penularan Covid-19. Fenomena 'revenge travel' atau 'revenge tourism' harus benar-benar diantisipasi, janga sampai terjadi ledakan kasus hanya gara-gara kita lengah.

Kita mengapresiasi capaian vaksinasi Covid-19 di DIY yang angkanya terus meningkat, sehingga mendekati terwujudnya 'herd immunity' atau kekebalan komunal. Kalaupun ini terwujud, vaksinasi mencapai 100 persen, bukan berarti prokes diabaikan. Prokes tetap dijalankan namun PPKM dilonggarkan sehingga aktivitas masyarakat, terutama sektor ekonomi, bisa berjalan normal. Kondisi melandainya Covid-19 jangan sampai membuat kita lengah, apalagi sampai kecolongan. Kita berharap Yogyakarta bisa menjadi percontohan bagi daerah lain dalam mengendalikan Covid-19.

IKM - Eksportir Berebut 'Scrap' Aluminium

PERSAINGAN usaha ke arah pasar bebas menjadikan industri dalam negeri harus kompetitif di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Namun persaingan nyatanya tidak hanya terjadi antar negara tetapi terjadi di dalam negeri antara pelaku industri kecil menengah (IKM) dengan pemodal atau eksportir terutama mengenai ketersediaan bahan baku. Industri aluminium merupakan salah satu dari sekian industri di Indonesia yang berusaha bertahan di tengah hantaman bahan baku yang mengalami lonjakan harga.

Untuk memperoleh logam aluminium diperlukan alumina yang memiliki spesifikasi metalurgi, yang dihasilkan melalui proses *digesting* (*bayer process*) terhadap bahan baku bauksit. Namun memproduksi aluminium perlu energi dan biaya yang besar sedangkan jumlah persediaan material tersebut semakin menipis. Limbah logam menjadi permasalahan serius, sehingga aluminium bekas (*aluminium scrap*) didaur ulang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku khususnya bagi para pelaku IKM.

Daur Ulang

Berdasarkan penelitian Leiv Kolbeinsen dari Norwegian University of Science and Technology menyebutkan, bahwa pengolahan *scrap* atau daur ulang aluminium hanya memerlukan 5-10% dari energi yang dibutuhkan untuk produksi primer melalui proses *digesting*. Pengolahannya memerlukan campuran bahan lain agar menghasilkan logam aluminium yang baik. Komposisi paduan aluminium utama yaitu Si (Silikon), Cu (Tembaga), Mn (Mangan) dan Mg (Magnesium). Bahan lain berupa silikon sebagai campuran *scrap* biasanya diimpor dari negara lain dan saat ini mengalami lonjakan harga.

Tingginya nilai impor bahan baku/penolong seperti silikon disinyalir karena beberapa factor. Di antaranya, sumber daya di dalam negeri yang belum tersedia dan sumber bahan baku lokal dan

Paryanto Utomo

standar mutu belum memadai. Juga belum sesuainya permintaan industri hilir (domestik). Maka apabila bahan baku/penolong tersebut ada, maka harganya lebih mahal dibandingkan impor, sulit diperolehnya atau bahkan belum ada suatu keberlanjutan supply. Di sinilah perlu adanya suatu hubungan yang sinergi antara pelaku usaha industri hulu domestik sebagai supplier bahan



KR-JOKO SANTOSO

baku/penolong dengan pelaku usaha industri hilir sebagai eksportir yang akan berdampak positif pada pencapaian penerimaan devisa negara.

Tingginya harga silikon berdampak kian langkanya *scrap* aluminium yang memiliki kandungan silikon. Sehingga saat ini IKM aluminium kesulitan untuk menjalankan produksi. Disisi lain pemerintah melakukan pembatasan impor *scrap* aluminium yang justru akan mematikan industri hilir aluminium karena kekurangan bahan baku. Saat ini, Indonesia hanya sanggup mengimpor 4-5 juta ton *scrap* logam. Padahal industri nasional membutuhkan 9 juta ton *scrap* logam per tahun. Sementara,

banyak IKM lokal sudah memiliki kemampuan untuk mengolah *scrap* logam. Sehingga yang diperlukan adalah mengembangkan desain teknologi untuk mengolah *scrap* logam.

Melindungi Produk

Indonesia memiliki SDA aluminium yang tinggi, mengapa tidak digunakan untuk produksi dalam negeri dan membatasi ekspor? Selain itu, pemerintah juga perlu mengkaji ulang kebijakan Bea Masuk Antidumping. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian maka akan dikenakan Bea Masuk Antidumping. Tujuan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri.

Namun, kebijakan tersebut akan membuat harga bahan baku impor seperti silikon dan *scrap* menjadi sangat tinggi dan bahkan memiliki selisih yang sangat jauh dari harga bahan baku lokal. Sedangkan kapasitas dari bahan baku lokal juga tidak menutupi kebutuhan industri nasional. Sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan Antidumping beserta kebijakan lain yang berkeadilan bagi IKM aluminium di Indonesia. □

** Paryanto S Utomo MAP, Kabid Advokasi & Kebijakan Asosiasi Pengusaha Aluminium Yogyakarta (Aspayo)*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Sandwich Generation

BAGI sebagian yang lain istilah sandwich generation terdengar asing dan kurang familier. Tapi bagi kalangan milenial, khususnya mereka yang sudah menikah dan memiliki keturunan, fenomena ini semakin banyak terdengar dan dibahas karena dinilai relevan dengan dunianya. Istilah sandwich generation pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981 oleh Dorothy A. Miller, professor di Universitas Kentucky, Amerika Serikat.

Sandwich generation merupakan sebutan yang diberikan kepada individu yang harus mencukupi kebutuhan ekonomi banyak pihak dalam waktu bersamaan. Mencakup diri sendiri, keluarga inti dan orang tua. Alhasil, generasi ini rentan mengalami stress akibat kondisi terjepit yang dialami, dan stress ini bisa berdampak buruk pada keluarga maupun lingkup sosial/pergaulan. Di Indonesia, generasi ini banyak dijumpai karena dinilai kental nuansa kekerabatan.

Ada tiga jenis sandwich generation. Pertama, traditional sandwich generation. Kelompok ini di dominasi generasi 40-50 tahun. Pada umumnya mereka harus menanggung kebutuhan anak-anak mereka yang sudah beranjak dewasa namun masih memerlukan dukungan finansial, sementara di pihak lain mereka juga harus memenuhi kebutuhan orang tua yang sudah lanjut usia.

Kedua, club sandwich generation. Mereka yang tergolong kategori ini umumnya berusia 50-60 tahun. Mereka terjepit antara mengurus orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang beranjak dewasa, bahkan cucu mereka. Termasuk dalam kategori ini juga mere-

ka yang berada pada usia 30-40 tahun dan memiliki anak yang masih kecil serta harus mengurus kebutuhan orang tua bahkan kakak-nenek mereka.

Ketiga, open-faced sandwich generation. Mereka yang terlibat dalam kegiatan perawatan lansia meski itu bukan pekerjaan inti mereka, seperti misalnya karyawan panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Diperkirakan sekitar 25 persen orang yang mengalami fase ini dalam hidupnya.

Bagi yang tergolong sandwich generation, berikut beberapa tips yang diberikan para ahli. Pertama, tentu harus menentukan manajemen keuangan. Pastikan dengan baik mengalokasikan uang ke pos-pos yang tepat dan tidak salah sasaran, seperti kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, biaya merawat orang tua, dan biaya kebutuhan diri sendiri.

Kedua, bantu anak menjadi sosok yang mandiri. Bila anak sudah dewasa namun masih bergantung secara finansial, bantulah untuk mulai bekerja. Ajari untuk hidup mandiri dan mengurus kebutuhannya sendiri. Seberapa pun sayangnya pada anak, ingatlah bahwa tidak akan bisa selamanya mendampingi.

Ketiga, diskusikan secara terbuka dengan keluarga tentang ekspektasi. Komunikasi yang baik dapat mengungkap ekspektasi, perasaan serta masalah yang muncul dari masing-masing pihak. Dengan demikian kita dapat mengantisipasinya sehingga terhindar dari stress. □

** Athiful Khoiri, Pascasarjana Psikologi UAD Yogya.*

Museum Membangun Ketangguhan Bangsa

MUSEUM adalah salah satu media pembelajaran untuk pendidikan sejarah yang penting guna mewujudkan penanaman kesadaran sejarah kepada generasi milenial. Museum menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya kemampuan berfikir, kreatif, serta mendorong tumbuh rasa bangga dan cinta tanah air. Museum merupakan jendela dunia dalam mengenal perjalanan panjang bangsa untuk modal sosial menjadi Bangsa Indonesia yang tangguh dan tanggap dalam menghadapi tantangan alam dan zaman. Keberadaannya sebagai lembaga yang menyimpan, memelihara dan memamerkan benda-benda warisan budaya yang bernilai sejarah dapat berperan sebagai wahana untuk membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila.

Adalah tugas kita mengomunikasikan dan mendekatkan museum dengan keluarga, sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan, membentuk karakter dan peradaban bangsa dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter. Adapun nilai-nilai untuk mempersiapkan bangsa yang tangguh, yaitu: religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunkatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Momen Bersejarah

Peringatan Hari Museum Indonesia tahun ini dipusatkan di Yogyakarta. Untuk mengingat momen bersejarah permuseum Indonesia, ikut merayakan 50 tahun Badan Musyawarah Musea (Barahamus) DIY sebagai asosiasi permuseum pertama di Indonesia. Barahamus adalah pencetus berdirinya

Ki Bambang Widodo

Badan Musyawarah Museum Indonesia (BMMI) yang kemudian menjadi Asosiasi Museum Indonesia (AMI), 28 Oktober 1998 di Yogyakarta. Di samping itu, penetapan hari museum dipilih karena Yogyakarta sebagai tempat pertama kali Musyawarah Museum Indonesia, 12-14 Oktober 1962. Hari ini puncak peringatan kolaborasi AMI, Barahamus DIY didukung Kemendikbudristek RI, Kemerparkraf RI dan Pemerintah DIY digelar.

Dalam sambutan tertulis Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Buku Kenangan 50 tahun Barahamus DIY yang akan diluncurkan pada peringatan Hari Museum Indonesia 2021, diungkapkan bahwa budaya adalah salah satu fondasi kebangsaan. Seperti yang dinyatakan Bung Karno, bahwa kreasi kultural bukan hanya sekadar hiburan tetapi juga menjadi upaya pengayaan wawasan sebagai bagian dari perjuangan. Semuanya itu adalah bagian esensial dari proses *nation-building*. Sejarah adalah guru yang baik.

Media Sosial

Dengan adanya pandemi Covid-19, menjadikan pelajaran bagi pengelola museum untuk lebih aktif, kreatif, inovatif dan komunikatif serta mengubah pola berfikir, pola bekerja, dan cara berinteraksi sosial. Di samping itu menjadi semangat untuk berkarya dan belajar lebih efektif efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, mengembangkan konten untuk disebarkan ke media massa dan media sosial: Televisi, Koran, Radio, AhatsApp, Instagram, Facebook,

Youtube, dan Virtual tour dan lainnya.

Semoga momentum peringatan Hari Museum Indonesia 2021 di Yogyakarta ini, menjadi pemacu dan pemicu semangat bagi insan permuseum. Paling tidak untuk pertama mengemas ulang strategi pengelolaan museum, baik pelayanan maupun program kegiatan secara kreatif dan inovatif. Kedua, bangkit melakukan pemutakhiran penyajian informasi sesuai trend penggunaan berbagai media, tantangan dan kebutuhan informasi dalam masyarakat. Ketiga: memiliki konten edukatif dan penguatan pendidikan karakter, serta mengikutsertakan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam ikut menjaga, melestarikan khasanah budaya dan keanekaragaman hayati untuk kejayaan □

** Ki Bambang Widodo SPd MPd, Ketua Umum Barahamus DIY/ Ketua I Asosiasi Museum Indonesia*

Pojok KR

Pelaku usaha butuh pelonggaran PPKM, tak hanya modal.

-- Boleh longgar tapi dibatasi.

Semua tempat keramaian harus terintegrasi QR Code.

-- Yang belum, segera melengkap.

Lampu hijau, anak di bawah 2 tahun masuk destinasi wisata

-- Harus ada jaminan keamanan kesehatan.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Per Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.